Jurnal PKM Manajemen Bisnis
Vol. 5, No. 1, January 2025

e-ISSN 2797-8338
DOI 10.37481

Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bogor: Tantangan dan Solusi

Nanang Suryana[1], Muhammad Baharuddin Zubakhrum Tjenreng[2]
Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Indonesia
mtsp.41.3567@ipdn.ac.id[1], tjenreng@gmail.com[2]

Submitted: 26th Oct 2024 | **Edited**: 07th Jan 2025 | **Issued**: 17th January 2025

Cited on: Suryana, N., & Tjenreng, M. B. Z. (2025). Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bogor: Tantangan dan Solusi. *Jurnal PKM Manajemen Bisnis*, *5*(1), 339-353.

ABSTRACT

Waste management has become one of the significant environmental issues in Indonesia, including in Bogor Regency. The growing waste, both from the household and industrial sectors, has a negative impact on cleanliness, health, and the quality of life of the community. Bogor Regency, as one of the areas with a high population density and rapid development, faces a major challenge in waste management. This journal aims to identify the issues surrounding waste management in Bogor Regency and provide recommendations for sustainable solutions. Based on statistical data and literature studies, it was found that the lack of adequate waste management infrastructure and low public awareness are the main factors contributing to this problem.

Keywords: Bogor Regency, Environment, Infrastructure, Public Awareness, Waste Management

PENDAHULUAN

Pengelolaan sampah di Kabupaten Bogor merupakan salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Kabupaten Bogor, yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 5 juta jiwa, dengan luas wilayah sekitar 2.000 km², menghadapi permasalahan sampah yang cukup kompleks, terutama dengan semakin pesatnya pertumbuhan penduduk dan urbanisasi.

Seiring dengan perkembangan jumlah penduduk dan sektor industri, produksi sampah di Kabupaten Bogor juga mengalami peningkatan yang signifikan. Sampah yang dihasilkan terdiri dari berbagai jenis, mulai dari sampah rumah tangga, sampah organik, sampah plastik, hingga sampah dari sektor industri dan perdagangan. Dalam beberapa tahun terakhir, volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir (TPA) di Kabupaten Bogor meningkat tajam, sementara kapasitas TPA yang ada terbatas.

Salah satu kendala utama dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bogor adalah kurangnya fasilitas dan infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai. Walaupun sudah ada upaya untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah, seperti sistem pengumpulan sampah terpisah antara sampah organik dan anorganik, masih banyak

e-ISSN 2797-8338
DOI 10.37481

daerah yang belum terjangkau oleh sistem pengelolaan sampah yang baik. Selain itu, kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilahan sampah dan daur ulang juga masih perlu ditingkatkan.

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah keberadaan TPA yang semakin penuh. TPA yang ada di Kabupaten Bogor, seperti TPA Galuga, menghadapi masalah kapasitas yang melebihi batas ideal. Akibatnya, sampah sering kali tidak terkelola dengan baik, yang dapat berdampak pada pencemaran lingkungan, seperti pencemaran air, udara, dan tanah.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Kabupaten Bogor telah berupaya melakukan berbagai program, seperti pengelolaan sampah berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle), pengembangan bank sampah, serta kampanye lingkungan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Namun, keberhasilan pengelolaan sampah tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah saja, melainkan memerlukan keterlibatan aktif dari masyarakat dalam mengurangi dan mengelola sampah dengan bijak.

Secara keseluruhan, pengelolaan sampah di Kabupaten Bogor masih membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan, guna menjaga kebersihan lingkungan dan kualitas hidup masyarakat. Kabupaten Bogor menghadapi masalah darurat sampah, dengan 2.700 ton sampah dihasilkan setiap hari, namun hanya 1.200 ton yang dapat dikelola secara konvensional. Sebanyak 1.500 ton sisanya belum terkelola dengan baik. Upaya Pemerintah Kabupaten Bogor diantaranya mengadakan diskusi dengan perusahaan untuk mencari solusi pengelolaan yang lebih efektif, termasuk optimalisasi TPPAS Lulut-Nambo.

Pada sisi lain, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor mengungkap minimnya jumlah armada untuk mengangkut sampah. Dari jumlah ideal 900 unit, DLH hanya memiliki 200 unit truk untuk mengangkut 2.700 ton sampah per hari ke tempat pembuangan akhir (TPA) Galuga.

Upaya lain yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam pengelolaan sampah, diantaranya Kabupaten Bogor kembali menata program lingkungan dalam bentuk Tim Terpadu mulai dari Kepala Desa, Lurah, Camat, UPT, RT RW, masyarakat juga Perangkat Daerah terkait sesuai tugas dan fungsinya. Tim terpadu ii memiliki peran yang sangat besar terutama dalam menjaga kebersihan lingkungan Kabupaten Bogor.

e-ISSN 2797-8338
DOI 10.37481

Selain itu, dalam upaya mengatasi permaslah sampah, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor berencana menerapkan sistem zonasi dalam pengelolaan sampah, mulai dari wilayah barat, timur, hingga selatan. DLH telah menunjuk tiga kecamatan sebagai pembagian zonasi pengelolaan sampah. Tiga kecamatan itu adalah Jasinga untuk wilayah barat, Cariu untuk wilayah timur, dan Cijeruk untuk wilayah selatan. Pembagian zonasi pengelolaan tersebut membuat pembuangan sampah di Kabupaten Bogor tidak hanya terpusat di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Galuga. Kemudian, biaya operasional truk sampah dapat lebih efisien.

Kebijakan Daerah

Dalam rangka mewujudkan Kabupaten Bogor yang sehat dan bersih dari sampah yang cenderung bertambah serta volume, jenis dan karakteristik yang semakin beragam sehingga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan dan mencemari lingkungan, Pemerintah Kabupaten Bogor telah memiliki kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan ini merupakan regulasi yang mengatur tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Bogor, bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Peraturan ini memuat berbagai aspek pengelolaan sampah yang melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

Disamping itu, pemeritnah Kabupaten Bogor juga telah menerbitkan kebijakan tentang pengelolaan sampah rumah tangga melalui Peraturan Bupati Bogor Nomor 88 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Bogor dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Regulasi ini mengatur pengelolaan sampah di Kabupaten Bogor, khususnya mengenai sampah rumah tangga dan jenis sampah lain yang berasal dari kegiatan rumah tangga. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan guna menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan.

Dari uraian tersebut, beberapa permasalahan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bogor yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan produksi sampah yang signifikan;
2. Keterbatasan infrastruktur pengelolaan sampah;
3. Kapasitas tempat pembuangan akhir (tpa) yang terbatas;
4. Minimnya kesadaran masyarakat tentang pemilahan sampah;

e-ISSN 2797-8338
DOI 10.37481

5. Keterbatasan armada pengangkut sampah;
6. Pengelolaan sampah yang belum terintegrasi secara efektif; dan
7. Keterbatasan sumber daya untuk pengelolaan sampah.

Permasalahan-permasalahan ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Kabupaten Bogor membutuhkan perhatian serius dan upaya yang lebih terkoordinasi untuk memperbaiki sistem pengelolaannya dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Pengertian Sampah

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Sampah adalah sisa kegiatan manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang tidak memiliki nilai guna bagi pemiliknya dan dibuang ke tempat sampah, baik berupa sampah rumah tangga, sampah industri, sampah pertanian, maupun sampah lainnya.

Menurut Soedjito (2002), Sampah adalah segala benda yang tidak digunakan atau tidak diperlukan lagi oleh pemiliknya karena sudah dianggap tidak memiliki nilai ekonomis dan telah terbuang dari tempat asalnya, sedangkan menurut Marwoto (2005), sampah adalah semua benda atau bahan yang tidak lagi digunakan atau tidak dibutuhkan oleh masyarakat setelah selesai masa penggunaannya dan dibuang atau dibuang ke tempat sampah.

Menurut Sutaryo (2006) bahwa sampah adalah segala jenis bahan yang tidak berguna lagi, baik dari rumah tangga maupun industri, yang tidak dapat digunakan dan dibuang begitu saja tanpa memikirkan dampaknya terhadap lingkungan. Hasbullah (2011) menyatakan bahwa sampah adalah benda atau bahan yang tidak digunakan lagi oleh pemiliknya dan telah terbuang atau ditinggalkan setelah proses penggunaan.

Pengelolaan Sampah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah adalah suatu rangkaian kegiatan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah, yang mencakup tahapan mulai dari pemilahan sampah, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pembuangan sampah yang tidak dapat didaur ulang. Tujuan utama dari pengelolaan sampah adalah untuk menjaga kebersihan, kesehatan masyarakat, serta mencegah kerusakan lingkungan akibat sampah. Pengelolaan sampah merupakan serangkaian kegiatan yang melibatkan pengumpulan, pemrosesan, pembuangan, dan daur ulang sampah dengan tujuan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Pengelolaan sampah yang

e-ISSN 2797-8338
DOI 10.37481

baik dapat meningkatkan kebersihan, melindungi sumber daya alam, serta menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Menurut Rochyadi (2003), pengelolaan sampah adalah suatu kegiatan yang meliputi semua tahapan mulai dari pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, pengolahan, hingga pembuangan sampah. Pengelolaan sampah harus dilakukan secara terorganisir dan terencana agar dampak buruk sampah terhadap lingkungan, seperti pencemaran, dapat diminimalisir. Pengelolaan yang baik juga mencakup upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah yang benar.

Tchobanoglous (1993), dalam bukunya yang berjudul Integrated Solid Waste Management, mendefinisikan pengelolaan sampah sebagai suatu proses yang melibatkan berbagai kegiatan mulai dari pembuatan kebijakan, perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan pembuangan sampah secara efisien dan ramah lingkungan. Menurutnya, pengelolaan sampah yang baik harus mempertimbangkan berbagai aspek seperti teknologi, sosial, ekonomi, dan peraturan pemerintah.

Menurut Saraswati (2014), pengelolaan sampah adalah usaha yang dilakukan untuk mengelola dan mengatur sampah yang dihasilkan dari berbagai sumber dengan tujuan untuk mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA), mengurangi pencemaran, dan memaksimalkan daur ulang. Hal ini juga mencakup peran masyarakat dalam pemilahan sampah dan pengelolaan sampah rumah tangga untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Menurut Rahyono (2011), pengelolaan sampah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mengelola sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia dengan tujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat. Pengelolaan sampah meliputi upaya pemilahan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan sampah yang sesuai dengan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle).

Tanner (2000) mengemukakan bahwa pengelolaan sampah adalah segala kegiatan yang terkait dengan proses pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan sampah. Kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi volume sampah yang ada, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, dan memanfaatkan sampah sebagai sumber daya, misalnya untuk menghasilkan energi atau bahan baku daur ulang.

e-ISSN 2797-8338
DOI 10.37481

Menurut Purbasari (2006), pengelolaan sampah merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk meminimalkan dampak sampah terhadap lingkungan. Ini melibatkan proses dari awal hingga akhir, yang mencakup pemilahan sampah di sumbernya, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan sampah secara efisien dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup yang berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan pengelolaan sampah di Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, dengan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena atau dengan fokus pada pemahaman makna di balik fenomena tersebut dalam konteks sosial dan budaya tertentu. Berbeda dengan penelitian kuantitatif, yang menggunakan data numerik dan statistik, penelitian deskriptif kualitatif lebih mengutamakan data berbentuk narasi, wawancara, atau observasi untuk memberikan gambaran yang lebih holistik dan mendalam mengenai objek yang diteliti.

Menurut Sugiyono (2012), penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan situasi atau fenomena secara lebih rinci dan mendalam, serta memahami pola-pola yang muncul dalam fenomena tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha menggali informasi yang relevan dengan cara mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Sugiyono juga menyatakan bahwa penelitian ini lebih menekankan pada pemahaman kontekstual dan sosial, serta menghindari generalisasi atau pengujian hipotesis.

Creswell (2014) menjelaskan bahwa metode penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan fenomena sosial dengan cara yang mendalam, menggali pengalaman dan makna yang dimiliki oleh individu atau kelompok terkait. Peneliti berfokus pada pengumpulan data naratif untuk menghasilkan pemahaman tentang bagaimana individu mengalami dan menanggapi fenomena tertentu dalam konteks sosial yang lebih luas. Penelitian ini mengandalkan wawancara terbuka, observasi, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data.

e-ISSN 2797-8338
DOI 10.37481

Denzin dan Lincoln (2011) menegaskan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang lebih menekankan pada pemahaman fenomena yang terjadi dalam konteks sosial. Dalam konteks ini, penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk mengungkapkan fenomena atau kejadian tertentu dengan mendalam dan secara menyeluruh. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi perspektif dan pengalaman yang berbeda dari individu atau kelompok yang terlibat dalam penelitian, serta menggali makna yang terkandung dalam pengalaman mereka.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Annisya Nurfadhillah dan Rita Rahmawati dengan judul Analisis Ketidakefektifan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bogor melalui Lensa Teori Struktural Fungsionalisme, menunjukkan hasil bahwa permasalahan pengelolaan sampah di Kabupaten Bogor tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur dan kebijakan pemerintah, tetapi juga melibatkan keterlibatan masyarakat dan aspek-aspek sosial lainnya. Teori Struktural Fungsionalisme membantu memahami bagaimana kegagalan dalam fungsi-fungsi sosial ini dapat mengganggu keseimbangan dan stabilitas sosial. Berdasarkan analisis Teori Struktural Fungsionalisme, ditemukan bahwa perbaikan dalam pengelolaan sampah memerlukan pendekatan yang holistik yang melibatkan peran semua pihak dalam masyarakat. Rekomendasi kebijakan termasuk peningkatan kesadaran masyarakat, partisipasi aktif dalam program daur ulang, serta perbaikan kebijakan pemerintah terkait pengelolaan sampah.

Bambang Yulianto, Muhlis, Yasnimar Ilyas, Benny Osta Nababan dalam jurnal penelitiannya yang berjudul Strategi Pengembangan Bisnis Bank Sampah Pusat Kabupaten Bogor, yang melakukan penelitian mengenai pengembangan usaha Bank Sampah Pusat dengan menggunakan Business Model Canvas dan Analisis SWOT menghasilkan beberapa kesimpulan. Pertama, pengelolaan bisnis Bank Sampah Pusat memberikan manfaat ekonomi bagi pengelola dan nasabah, tercermin dari peningkatan pembelian, penjualan, dan jumlah nasabah. Kedua, Bank Sampah Pusat menjadi contoh dengan terbentuknya Bank Sampah Induk Solusi Hijau di Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, yang terdiri dari 7 Bank Sampah Unit dan 2 Bank Sampah Mitra. Ketiga, analisis menunjukkan bahwa Bank Sampah Pusat memiliki strategi yang baik dalam mengantisipasi ancaman internal, meskipun terdapat beberapa kelemahan, seperti kurangnya fasilitas layanan, promosi, dan pelatihan untuk semua Bank Sampah Unit di

e-ISSN 2797-8338
DOI 10.37481

Kabupaten Bogor, serta ketergantungan pada Dinas Lingkungan Hidup untuk biaya operasional.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sri Afnitawati Rizky, Alfian Prayoga Saputra, Asropi Asropi (2024) dengan judul Model Collaborative Governance Pengelolaan Persampahan Di Kabupaten Bogor, disimpulkan bahwa kolaborasi dan pembagian kerja antar peran pemangku kepentingan sudah terlaksana namun belum optimal.

PEMBAHASAN

Pengelolaan sampah di Kabupaten Bogor menghadapi beberapa tantangan besar yang harus diatasi untuk menciptakan sistem pengelolaan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Peningkatan volume sampah yang cepat, ditambah dengan keterbatasan infrastruktur pengelolaan, menjadi masalah utama. Penurunan kapasitas Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA), seperti TPA Galuga yang sudah hampir mencapai kapasitas maksimal, memperburuk situasi ini. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan dalam sistem pengelolaan, termasuk pengoptimalan teknologi pemilahan dan pengolahan sampah yang dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor tentang Jumlah Timbunan Sampah Menurut Kecamatan tahun 2020-2023, bahwa pada jumlah timbunan sampah/hari/kapita pada tahun 2023 mencapai 2747 Ton, sedangkan sampah yang terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) hanya sebanyak 835 Ton/Hari, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Pelayanan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bogor Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Timbunan Sampah Menurut Kecamatan		
		Timbunan Sampah/ Hari/ Kapita (Ton)	Terangkut Ke TPA (Ton/ Hari)	Tingkat Pelayanan (%)
1	Nanggung	50	8	16
2	Leuwiliang	63	15	23,81
3	Leuwisadeng	39	9	23,08
4	Pamijahan	80	12	15
5	Cibungbulang	74	17	22,97
6	Ciampea	85	12	14,12
7	Tenjolaya	32	3	9,38
8	Dramaga	56	9	16,07
9	Ciomas	86	34	39,53
10	Tamansari	55	26	47,27
11	Cijeruk	46	10	21,74

e-ISSN 2797-8338
DOI 10.37481

No	Kecamatan	Jumlah Timbunan Sampah Menurut Kecamatan		
		Timbunan Sampah/ Hari/ Kapita (Ton)	Terangkut Ke TPA (Ton/ Hari)	Tingkat Pelayanan (%)
12	Cigombong	49	12	24,49
13	Caringin	66	6	9,09
14	Ciawi	58	15	25,86
15	Cisarua	64	32	50
16	Megamendung	54	22	40,74
17	Sukaraja	105	21	20
18	Babakan Madang	58	27	46,55
19	Sukamakmur	43	5	11,63
20	Cariu	26	5	19,23
21	Tanjungsari	29	5	17,24
22	Jonggol	73	64	87,67
23	Cileungsi	146	79	54,11
24	Kelapa Nunggal	66	14	21,21
25	Gunung Putri	151	31	20,53
26	Citeureup	108	27	25
27	Cibinong	183	123	67,21
28	Bojong Gede	146	31	21,23
29	Tajur Halang	63	21	33,33
30	Kemang	53	15	28,3
31	Ranca Bungur	31	15	48,39
32	Parung	62	14	22,58
33	Ciseeng	56	15	26,79
34	Gunung Sindur	65	14	21,54
35	Rumpin	74	9	12,16
36	Cigudeg	68	9	13,24
37	Sukajaya	34	3	8,82
38	Jasinga	54	12	22,22
39	Tenjo	37	12	32,43
40	Parung Panjang	59	22	37,29
	Kabupaten Bogor	2747	835	30,4

Sumber: BPS Kabupaten Bogor Tahun 2023

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa tingkat pelayanan pengangkutan sampah hanya mampu ditangani oleh Pemerintah Daerah sebanyak 30,4% saja. Artinya lebih dari 60% sampah yang ada tidak terangkut dan terkelola oleh Pemerintah Daerah dan memerlukan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Tantangan Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah di Kabupaten Bogor menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam pengelolaan sampah di daerah ini:

e-ISSN 2797-8338
DOI 10.37481

1. Peningkatan Produksi Sampah

   Kabupaten Bogor memiliki jumlah penduduk yang besar`, sekitar 5 juta jiwa, yang menyebabkan produksi sampah semakin meningkat setiap tahun. Selain itu, dengan pesatnya urbanisasi dan berkembangnya sektor industri serta perdagangan, volume sampah yang dihasilkan sangat tinggi, mencapai 2.700 ton per hari. Namun, hanya sekitar 1.200 ton sampah yang dapat dikelola dengan sistem konvensional, sedangkan sisanya 1.500 ton sering tidak terkelola dengan baik.

2. Keterbatasan Infrastruktur Pengelolaan Sampah

   Salah satu tantangan besar dalam pengelolaan sampah adalah keterbatasan fasilitas dan infrastruktur pengelolaan sampah yang ada. Walaupun sudah ada sistem pemilahan sampah antara sampah organik dan anorganik, banyak daerah di Kabupaten Bogor yang belum terjangkau oleh sistem ini. Selain itu, kapasitas Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) seperti TPA Galuga sangat terbatas, sehingga sering kali sampah tidak dapat dikelola dengan baik.

3. Minimnya Armada Pengangkut Sampah

   Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor hanya memiliki 200 unit truk pengangkut sampah, jauh di bawah jumlah ideal yang seharusnya mencapai 900 unit untuk dapat mengangkut 2.700 ton sampah per hari. Hal ini menyebabkan pengangkutan sampah menjadi tidak efisien dan seringkali menumpuk di beberapa titik.

4. Kesadaran Masyarakat yang Rendah

   Meskipun ada upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilahan sampah dan daur ulang, masih banyak warga yang belum sepenuhnya sadar akan pentingnya tindakan tersebut. Kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat dalam program pemilahan dan daur ulang menyebabkan sampah sering kali tidak terkelola dengan baik sejak dari sumbernya.

5. Keterbatasan Sumber Daya

   Selain keterbatasan armada dan infrastruktur, Kabupaten Bogor juga menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan dana untuk pengelolaan sampah yang efektif. Pemerintah daerah masih kesulitan untuk memperluas dan mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang lebih modern dan efisien, baik dari sisi teknis maupun pendanaan.

e-ISSN 2797-8338
DOI 10.37481

6. Keterbatasan Kapasitas Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA)

   Kapasitas TPA yang ada sudah sangat terbatas. TPA Galuga, yang menjadi salah satu tempat pembuangan sampah utama, seringkali sudah melebihi kapasitas. Hal ini menyebabkan sampah yang dibuang tidak terkelola dengan baik, meningkatkan risiko pencemaran lingkungan, termasuk pencemaran tanah, air, dan udara.

7. Kurangnya Pengelolaan Sampah yang Terintegrasi

   Pengelolaan sampah di Kabupaten Bogor belum sepenuhnya terintegrasi dengan baik. Program-program pengelolaan sampah yang ada, seperti pengelolaan berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dan pengembangan bank sampah, belum dapat diterapkan secara konsisten di seluruh wilayah. Sering kali, ada ketidaksesuaian antara kebijakan pemerintah dengan implementasi di lapangan.

8. Pengelolaan Sampah Industri dan Komersial

   Selain sampah rumah tangga, sampah dari sektor industri dan perdagangan juga semakin meningkat. Pengelolaan sampah dari sektor ini sering kali tidak sepenuhnya diatur atau diawasi, sehingga sampah dari kegiatan industri atau komersial dapat mencemari lingkungan.

9. Tantangan dalam Kolaborasi dan Pembagian Tugas

   Meskipun ada upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam pengelolaan sampah, namun pembagian tugas dan kolaborasi ini belum optimal. Hal ini menghambat pengelolaan sampah yang efektif dan berdampak pada kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.

KESIMPULAN

Pengelolaan sampah di Kabupaten Bogor memerlukan perbaikan dalam infrastruktur, peningkatan kesadaran masyarakat, dan penguatan regulasi untuk mendukung keberlanjutan pengelolaan sampah yang lebih baik. Pendekatan yang lebih terkoordinasi dan partisipatif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat diperlukan agar masalah pengelolaan sampah dapat teratasi secara efektif dan berdampak positif bagi lingkungan serta kesejahteraan sosial masyarakat.

Mengatasi permasalahan sampah di Kabupaten Bogor memerlukan pendekatan yang holistik dan melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, sektor

e-ISSN 2797-8338
DOI 10.37481

swasta, serta pihak-pihak lain yang terkait. Berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi permasalahan sampah di Kabupaten Bogor:

1. Peningkatan Infrastruktur Pengelolaan Sampah
   a. Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah yang Memadai

      Menambah kapasitas TPA yang ada dan membangun TPA baru yang ramah lingkungan dan efisien, dengan mengoptimalkan teknologi pengolahan sampah seperti daur ulang, composting, atau incineration.
   b. Penyediaan Fasilitas Pemilahan Sampah

      Meningkatkan fasilitas pemilahan sampah di tingkat rumah tangga dan tempat umum, serta menyediakan lebih banyak bank sampah yang dapat dikelola oleh masyarakat untuk mendaur ulang sampah.
2. Peningkatan Armada Pengangkut Sampah
   a. Penambahan Armada Pengangkut Sampah

      Meningkatkan jumlah armada pengangkut sampah yang ada untuk memastikan sampah dapat diangkut secara efisien dan tepat waktu. Penambahan armada truk pengangkut sampah yang memadai akan mengurangi penumpukan sampah di jalanan dan tempat umum.
   b. Optimasi Rute Pengangkutan

      Mengoptimalkan rute pengangkutan sampah agar lebih efisien dan dapat mengurangi biaya operasional. Sistem pengangkutan yang terintegrasi akan mengurangi kemacetan dan meningkatkan waktu pengangkutan sampah.
3. Edukasi dan Peningkatan Kesadaran Masyarakat
   a. Kampanye Kesadaran Lingkungan

      Meningkatkan kampanye edukasi untuk masyarakat mengenai pentingnya pemilahan sampah sejak dari sumbernya (rumah tangga, pasar, sekolah, dan kantor). Melakukan sosialisasi tentang konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle) yang dapat mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA.
   b. Pelatihan Pemilahan Sampah dan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

      Memberikan pelatihan kepada masyarakat, terutama di tingkat RT dan RW, mengenai cara-cara yang tepat untuk memilah sampah organik dan anorganik di rumah tangga, serta manfaatnya.

e-ISSN 2797-8338
DOI 10.37481

4. Penerapan Kebijakan yang Lebih Ketat
   a. Kebijakan Pemilahan Sampah Wajib

      Menerapkan kebijakan pemilahan sampah secara wajib di seluruh Kabupaten Bogor, dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dan sektor usaha. Pemerintah dapat mengeluarkan peraturan yang mengharuskan pemilahan sampah di tingkat rumah tangga dan sektor usaha.

   b. Pengawasan terhadap Sampah Industri dan Komersial

      Melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap sampah yang dihasilkan oleh sektor industri dan komersial. Industri harus bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah yang dihasilkan, termasuk meminimalkan sampah yang tidak dapat didaur ulang.

5. Pengembangan Program Daur Ulang dan Bank Sampah
   a. Pengembangan Bank Sampah

      Memperluas jumlah dan jaringan bank sampah di Kabupaten Bogor. Bank sampah dapat dijadikan wadah bagi masyarakat untuk mengumpulkan dan mendaur ulang sampah anorganik, yang kemudian bisa dijual atau dimanfaatkan kembali.

   b. Kerja Sama dengan Industri Daur Ulang

      Mendorong sektor industri untuk lebih aktif dalam daur ulang sampah, serta memberikan insentif bagi perusahaan yang berinvestasi dalam teknologi pengelolaan sampah dan daur ulang.

6. Penggunaan Teknologi Pengelolaan Sampah Modern
   a. Teknologi Pengolahan Sampah

      Menggunakan teknologi pengolahan sampah yang ramah lingkungan, seperti incinerator (pembakaran sampah) yang dapat mengurangi volume sampah, atau teknologi biogas untuk sampah organik. Penggunaan teknologi ramah lingkungan dapat mengurangi dampak sampah terhadap lingkungan.

   b. Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Sampah

      Membuat aplikasi digital yang memudahkan masyarakat dalam mengelola sampah mereka, termasuk pemilahan sampah, pengumpulan, dan informasi terkait jadwal pengangkutan sampah.

e-ISSN 2797-8338
DOI 10.37481

7. Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas
   a. Penguatan Peran Komunitas

      Mengembangkan program pengelolaan sampah berbasis komunitas yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengelolaan sampah di lingkungan mereka, seperti program gotong royong atau kerja sama antar komunitas untuk mengurangi sampah yang tidak terkelola.
   b. Pemberdayaan Kelompok Masyarakat

      Memberdayakan kelompok masyarakat (misalnya, kelompok PKK, kelompok ibu-ibu, atau kelompok remaja) untuk terlibat dalam kegiatan pengelolaan sampah seperti pengomposan, daur ulang, dan edukasi lingkungan.
8. Kolaborasi dengan Sektor Swasta dan Pihak Ketiga
   a. Kemitraan dengan Perusahaan Swasta

      Mendorong perusahaan swasta untuk bekerja sama dalam pengelolaan sampah, baik dalam bentuk CSR (Corporate Social Responsibility) untuk mendukung program pengelolaan sampah, maupun melalui fasilitas daur ulang dan pengurangan sampah.
   b. Pendanaan untuk Program Pengelolaan Sampah

      Menjalin kemitraan dengan lembaga atau donor internasional untuk mendapatkan dukungan pendanaan bagi program-program pengelolaan sampah yang lebih besar dan berkelanjutan.
9. Penguatan Regulasi dan Penegakan Hukum
   a. Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lingkungan

      Meningkatkan penegakan hukum terkait pelanggaran pengelolaan sampah, seperti membuang sampah sembarangan atau tidak melakukan pemilahan sampah sesuai dengan peraturan yang ada. Penerapan sanksi yang tegas dapat mendorong masyarakat untuk lebih disiplin.
   b. Insentif untuk Pelaku Pengelolaan Sampah yang Baik

      Memberikan insentif bagi individu, kelompok, atau organisasi yang berhasil mengelola sampah dengan baik melalui sistem pengelolaan yang efektif dan ramah lingkungan.

e-ISSN 2797-8338
DOI 10.37481

10. Kolaborasi Antar Pemerintah Daerah

Langkah lain yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor dalam mengatasi permasalahn sampau yaitu dengan mengoptimalkan kolaborasi antara Kabupaten Bogor dengan kota-kota lain di sekitarnya dalam hal pengelolaan sampah, terutama dalam pengelolaan TPA dan fasilitas pengolahan sampah lainnya. Kerjasama ini akan meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Annisya Nurfadhillah, Rita Rahmawati, Analisis Ketidakefektifan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bogor Melalui Lensa Teori Struktural Fungsionalisme (2024), Jurnal Administrasi Publik, ISSN: 2715-2499,Volume 7Nomor 1, April 2024.

Bambang Yulianto, Muhlis, Yasnimar Ilyas, Benny Osta Nababan dalam jurnal penelitiannya yang berjudul Strategi Pengembangan Bisnis Bank Sampah Pusat Kabupaten Bogor Jurismata, Vol. 4 No. 2 – Desember 2022 e- ISSN: 2685 – 1164, p- ISSN: 2656 – 6923

Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. 4th Edition. Thousand Oaks: Sage Publications.

Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2011). The SAGE Handbook of Qualitative Research. 4th Edition. Thousand Oaks: Sage Publications.

Hasbullah, H. (2011). Pengelolaan Sampah dan Dampaknya terhadap Lingkungan. Bandung: Alfabeta. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

Marwoto, M. (2005). Manajemen Pengelolaan Sampah di Kota-kota Besar. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Patton, M. Q. (2002). Qualitative Research & Evaluation Methods. 3rd Edition. Thousand Oaks: Sage Publications.

Peraturan Bupati Bogor Nomor 88 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Bogor dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.

Purbasari, A. (2006). Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota-kota Besar. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.

Rahyono, S. (2011). Pengelolaan Sampah di Indonesia. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

Rochyadi, A. (2003). Manajemen Lingkungan. Bandung: Alfabeta.

Saraswati, A. (2014). Pengelolaan Sampah dan Lingkungan. Jakarta: Erlangga.

Soedjito, S. (2002). Pengelolaan Sampah dan Lingkungan.

Sri Afnitawati Rizky, Alfian Prayoga Saputra, Asropi Asropi (2024), Model Collaborative Governance Pengelolaan Persampahan Di Kabupaten Bogor, Vol 24, No 1 (2024)

Sugiyono, (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sutaryo, S. (2006). Teori Pengelolaan Sampah di Masyarakat. Jakarta: Rineka Cipta.

Tanner, C. (2000). Solid Waste Management: A Complete Guide to Waste Handling. New York: Wiley.

Tchobanoglous, G. (1993). Integrated Solid Waste Management. New York: McGraw-Hill.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.